

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hizbut Tahir memiliki arti Partai Pembebasan dalam Bahasa Arab, didirikan pada 1953 oleh as-Syaikh Taquiuddin al-Nabhani, oleh seorang hakim pengadilan di Palestina dan kini telah tersebar di 45 negara. Hizbut Tahir mengklaim gerakannya dan menitikberatkan perjuangan membangkitkan umat Islam di seluruh dunia, bertujuan untuk menegakkan Kekhalifahan Islam atau negara Islam. Organisasi ini aktif di beberapa negara barat, terutama Inggris, beberapa negara di Timur Tengah dan Asia Tengah. Pada masa-masa awal organisasi yakni tahun 1960-an, kelompok ini menghasilkan serangkaian kudeta yang gagal di Yordania, Suriah dan Mesir. Yang kemudian pada akhir 1970, penyebarannya diperluas ke Amerika, Inggris dan Australia. Dimana cabang Indonesia sendiri didirikan melalui koneksi anggota cabang Australia (Amindoni, 2017).

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan. Hizbut Tahrir mengemban dakwah Islam agar Islam dapat diterapkan dalam kehidupan dan agar Aqidah Islamiyah menjadi dasar negara, dasar konstitusi dan undang-undang. Karena Aqidah Islamiyah adalah aqidah aqliyah (aqidah yang menjadi dasar pemikiran) dan aqidah siyasiyah (aqidah yang menjadi dasar politik) yang melahirkan aturan untuk memecahkan problematika manusia secara keseluruhan, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, dan lain-lain. Dari paparan ini maka jelas bahwa pandangan Hizbut Tahrir merupakan pandangan yang memiliki dasar Islam (agama) yang mengatur seluruh kehidupan manusia.

Dalam pembahasan terkait judul skripsi yang penulis buat, maka juga perlu pengkajian awal dalam latar belakang masalah ini yakni terkait dengan PT Freeport. PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Perusahaan ini memiliki kegiatan menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di kabupaten Mimika, provinsi Papua, Indonesia (PT Freeport Indonesia, 2013). PT Freeport berlandaskan perspektif Liberal yang mengakui kebebasan individu dan memandang bahwa akal pikiran manusia dan prinsip-prinsip rasional yang ada di dalam masing-masing individu yang dapat menyelesaikan masalah-masalah internasional. Ideologi ini, memiliki ciri-ciri yang mendasar yakni anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh; pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas; kekuasaan dari orang lain merupakan hal yang buruk; suatu masyarakat dikatakan bahagia apabila setiap individu atau sebagian besar individu bahagia (Surbakti, 2010).

Tidak dapat dipungkiri bahwa masuknya perusahaan multinasional diperkirakan dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang mendukung gagasan pembangunan modern. Yang dapat menimbulkan dampak positif bagi suatu negara yang didudukinya. Menurut data hasil kajian Lembaga Pengembangan Ekonomi Masyarakat (LPEM) UI tahun 2013, dimana kehadiran Freeport telah berkontribusi 91% terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Mimika, 38% kepada PDRB Papua, 1,7% dari total APBN, 0,8% dari seluruh pendapatan rumah tangga nasional dan 44% dari pemasukan rumah tangga di Provinsi Papua. Sejak kurun 1992–2016, Freeport telah menginvestasikan lebih dari US\$ 1,46 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan masyarakat Mimika. Pembangunan kota, bandara, jalan, jembatan, gedung pemerintahan, rumah sakit, fasilitas air bersih, lapangan terbang perintis, fasilitas air bersih, serta stadion olah raga Mimika, dapat dilihat dengan kasat mata jika berkunjung ke wilayah ini (Suhartadi, 2017). Paparan tersebut

dapat mewakili beberapa dampak positif dari sisi pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh Freeport dimana adanya pengakuan oleh pemerintah Indonesia atas tergasnya pembangunan modern dari yang dikelola oleh PT Freeport sebagai perusahaan multinasional yang berasal dari negara barat.

Bukan hanya dalam pembangunan daerah namun juga pada sisi penyerapan tenaga kerja, yang akan memberi pengaruh positif bagi masyarakat sekitar kedudukan perusahaan ataupun masyarakat Indonesia sendiri. Dari total pekerja langsung dan kontrak yang berjumlah 33.452, pekerja Indonesia asli Papua mencapai 8.413 orang atau 25,15 persen, dan pekerja Indonesia non Papua sejumlah 24.195 orang atau 72,33 persen. Sedangkan tenaga kerja asing berjumlah 844 orang atau 2,5 persen. Adapun karyawan langsung PT Freeport Indonesia yang berjumlah 12.184, karyawan Indonesia asli Papua mencapai 4.357 atau 35,76 persen dan karyawan Indonesia non Papua sejumlah 7.652 atau 62,80 persen. Sedangkan karyawan asing hanya sejumlah 175 orang atau 1,44 persen.

Ditengah keoptimisan dari PT Freeport dan juga berbagai pihak yang mendukung seperti halnya pemerintah Indonesia dan juga pemerintah daerah Papua, namun Hizbut Tahrir Indonesia memiliki pandangan yang berbeda yakni menolak keberadaan perusahaan ini, terutama pada Kontrak Karya yang berlangsung antara kedua tokoh utama yakni Pemerintah Indonesia dan juga PT Freeport. Hizbut Tahrir Indonesia juga banyak mengkritik tentang Undang-Undang Mineral dan Batubaru (UU-Minerba) yang dikatakan sebagai 'Kado Pahit' Untuk Rakyat. Kelompok ini mengatakan bahwa DPR yang katanya "*wakil rakyat*" menunjukkan 'wajah asli'-nya: mengkhianati rakyat. Di akhir tahun 2008, DPR 'menghadiahi' rakyat dengan dua 'kado pahit'. Pertama: UU Minerba (Undang-undang Mineral dan Batubara) yang disahkan pada 16 Desember 2008. Kedua, UU BHP (Undang-undang Badan Hukum Pendidikan) yang disahkan pada 17 Desember 2008. Artinya, pengesahan kedua UU ini hanya

berselang sehari. HTI menganggap pengesahan kedua UU ini menjadi bukti pengkhianatan DPR juga Pemerintah terhadap rakyat yang diwakilinya untuk kesekian kalinya (Al-Islam Buletin, 2009). Bukan hanya dalam media cetak yang ditulis oleh kelompok masyarakat tersebut, namun juga unjuk rasa terkait hal ini juga pernah menjadi sorotan seius bagi berbagai pihak, unjuk rasa ini terjadi pada tahun 2015 lalu yang berlangsung di Jakarta yakni tepat di depan Istana Negara dengan tujuan menolak perpanjangan Kontrak Karya yang akan diperpanjang dan dimulai pada tahun 2021 mendatang.

Beberapa contoh kasus diatas yang dapat dikatakan erat kaitannya dengan pengelolan sumber daya alam yakni sama halnya adanya peroperasian PT Freeport di Indonesia. Maka, hal ini amejadi dasar pemikiran bagi penulis dalam merumuskan masalah yaitu terkait PT Freeport yang dapat dikatakan sejalan dengan pemerintah, namun berbeda dengan HTI yang justru menolak keberlangsungan hubungan kerjasama yang akan memperpanjang Kontrak Karya Indonesia-PT Freeport.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mencoba untuk meneliti permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: Mengapa Hizbut Tahrir Indonesia mendesak pemerintah untuk menolak perpanjangan Kontrak Karya Indonesia-PT Freeport ?

C. Kerangka Dasar Teori

Untuk menjawab rumusan masalah, penulis membutuhkan dukungan dari teori persepsi yang digunakan dalam melihat bagaimana perbedaan pendekatan antara ekonomi politik Liberal yang dianut oleh PT Freeport dan politik ekonomi yang dianut oleh HTI. Maka pembahasan ini juga membutuhkan kedua pendekatan tersebut. Dan karena pokok pembahasan yang dibuat oleh penulis merupakan

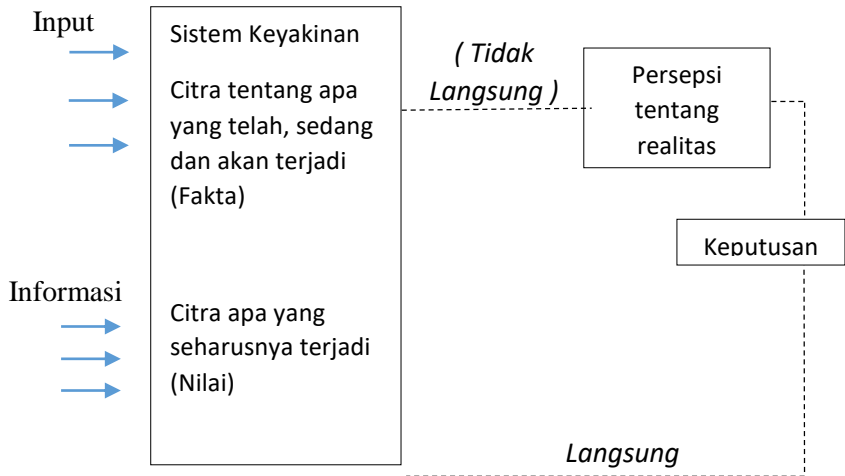
pembahasan yang merujuk kepada pengelolaan sumber daya alam dalam jumlah tak terbatas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan besar, diperlukan juga sebagai dukungan bagi teori persepsi yakni terkait konsep pengelolaan sumber daya alam.

1. Teori Persepsi

Persepsi yaitu rangsangan dari luar seperti gerak suatu obyek dan rangsangan dari dalam seperti sesuatu yang ditangkap dari inderanya yang akan mempengaruhi tindakan individu mendefinisikan situasi. Menurut Mochtar Maso'ed, naluri dan kepribadian adalah segi-segi individual yang bersifat statik, sedangkan persepsi atau citra yang dimiliki oleh individu bersifat dinamik, karena persepsi seringkali berubah, walaupun persepsi mungkin salah tetapi persepsi memainkan peran dalam menentukan perilaku suatu negara. Thomas Franck dan Edward Weisband menekankan pentingnya persepsi atau citra, yaitu : “Cara negara melihat satu sama lain sering menentukan cara mereka berinteraksi suatu kerjasama sistematis tidak mungkin berkembang diantara negara yang menganggap liar, jahat, agresif dan tidak bermoral.” (Mas'oeed, 1989, hal. 19).

Teori persepsi ini juga di kemukakan oleh Ole R Holsti yang membuat diagram yakni menggambarkan persepsi dan hubungannya dengan citra dan sistem keyakinan (belief system). Dimana tanggapan seseorang terhadap situasi atau suatu stimulus, didasarkan pada persepsinya tentang situasi itu. Para pembuat keputusan seperti halnya manusia lainnya, dipengaruhi oleh berbagai proses psikologis yang mempengaruhi persepsi (misalnya kehendak untuk merasionalkan tindakan untuk mempertahankan pendapat sendiri, untuk mengurangi kecemasan dan sebagainya) dan proses psikologis lain yang membentuk kepribadiannya.

Gambar 1.1 Skema Teori Persepsi Menurut Ole R Holsti



Menurut teori ini terdapat beberapa elemen yang mempengaruhi seseorang dalam menyikapi situasi. Elemen tersebut adalah citra keyakinan dan perilaku internasional. Pada mulanya nilai dan keyakinan seseorang membantunya menetapkan arah perhatiannya, yaitu menentukan apa stimulusnya, apa yang dilihat dan apa yang diperhatikan, kemudian berdasarkan sikap dan citra yang telah dipegangnya selama ini, stimulus itu diinterpretasikan. Interpretasi ini kemudian membentuk citra-citra tertentu. Yang dibagi menjadi dua jenis citra, yakni citra terbuka dan citra tertutup. Citra yang terbuka menerima semua informasi yang baru, walaupun mungkin bertentangan dengan citra yang telah dipegangnya, bahkan kalau perlu merubah citra yang sudah dianut itu agar cocok atau sesuai dengan kenyataan. Citra tertutup, terjadi karena alasan-alasan psikologis, menolak perubahan dan karenanya mengabaikan saja informasi yang bertentangan dengannya dan memilih bagian-bagian tertentu

dari informasi yang masuk, yang bisa dipakai untuk mendukung citra yang telah ada.

Kedua citra yang tercipta tersebut dapat dikatakan sebagai penyaring, yang artinya setiap orang hanya memperhatikan sebagian saja dari dunia sekitarnya, dan setiap orang memiliki serangkaian citra yang berbeda-beda untuk menginterpretasikan informasi yang masuk. Persepsi yang berdasarkan pada citra yang sudah ada sebelumnya adalah proses selektif. Dimana sistem keyakinan adalah sekumpulan keyakinan, citra atau “model” tentang dunia yang dianutnya oleh seseorang, karena membantunya berorientasi. Teori persepsi ini memberikan dukungan pada kasus ini bahwa adanya cara pandang yang berbeda dalam melihat objek yang sama. Seperti halnya pandangan Hizbut Tahrir Indonesia dan PT Freeport dalam melihat satu aktor yakni Negara. Negara bagi HTI merupakan aktor utama bagi sistem politik ekonomi Islam. Sedangkan menurut pandangan PT Freeport Negara merupakan aktor sekunder yang hanya menjadi pengontrol sistem ekonomi.

2. Pendekatan Ekonomi Politik Liberal dan Politik Ekonomi Islam

Dalam kajian ekonomi politik berarti ekonomi didefinisikan sebagai sistem produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan; sedang politik sebagai sehimpunan lembaga dan aturan yang mengatur berbagai interaksi sosial ekonomi. Adapun dua pendekatan dalam melihat korelasi antara ekonomi dan politik, yaitu pertama, pendekatan ekonomi politik dan kedua pendekatan politik ekonomi (Deliarnov, 2006). Pandangan Liberal dalam ekonomi politik memiliki asumsi dasar bahwa ekonomi-lah yang seharusnya menentukan politik. Peran negara adalah sekunder, terbatas sebagai penjamin pasar bebas.

Perspektif Liberal ini mengajukan argumen bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan kekayaan nasional adalah dengan membiarkan pertukaran antar individu dalam ekonomi

domestik dan internasional berjalan secara bebas dan tidak perlu adanya batasan. Individu dibiarkan bebas mengejar kepentingan sendiri dalam suatu ekonomi perdagangan yang didasarkan pada suatu pembagian kerja dan pada struktur atau komposisi faktor-faktor produksinya sendiri, maka kesejahteraan suatu kelompok individu, suatu bangsa atau suatu kelompok bangsa akan bisa ditingkatkan.

Selanjutnya, kaum Liberal juga berasumsi bahwa individu (yaitu konsumen, perusahaan atau wiraswasta individual) adalah faktor utama dan mereka berperilaku rasional dan selalu berusaha memaksimalkan perolehan. Tindakan rasional yang dimaksud adalah tindakan yang didasarkan pada kalkulasi untung-rugi atas berbagai pilihan kemungkinan. Seorang aktor dianggap dianggap memaksimalkan perolehan kalau ia, sesudah melakukan kalkulasi untung-rugi tentang berbagai kemungkinan, memilih pilihan yang menghasilkan kepuasan subyektif paling tinggi (Masoed, 2014).

Konsep ekonomi politik ini menjelaskan bahwa meski PT Freeport berada di Indonesia, namun mayoritas kepemilikan tambang emas itu berada di tangan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Pandangan dan sistem kaum liberal memang seperti ini selalu memperhitungkan kalkulasi untung rugi sebuah perusahaan yang kemudian menghegemoni negara yang ditumpangnya. Faktanya, yakni pada tahun 2015 lalu, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. tercatat memiliki 81,28 persen saham, pemerintah Indonesia sekitar 9,36 persen dan PT Indocopper Investama sebanyak 9,36 persen. Hal inilah yang dilakukan oleh kaum Liberal selalu menginginkan perolehan yang maksimal atau dengan kata lain yakni memaksimalkan untung sebesar-besarnya dengan bnyak meminimalisir kerugian sekecil-kecilnya.

Sedang, dasar dari politik ekonomi Islam, Negara merupakan aktor utama yang menjamin pemenuhan semua kebutuhan primer (*pangan, sandang dan papan*) setiap individu maupun kebutuhan-kebutuhan sekundernya sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam suatu

masyarakat dengan gaya hidup tertentu. Dengan demikian Islam memandang setiap orang secara individual, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah Negara. Konsep ini juga memiliki tiga pilar utama yakni yang pertama, kepemilikan; yang dibagi dalam kepemilikan individu, umum dan negara. Kedua, distribusi; yang mencakup mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Ketiga, pengelolaan; yang dibagi dalam konsumsi dan investasi (Al Maliki, 2009).

Maka politik ekonomi Islam ini memandang PT Freeport yang berasal dari ideologi Liberal adalah hal yang bertolak belakang dengan landasannya terutama terkait dengan negara merupakan aktor primer yang menjamin kesejahteraan warga Negara. Meskipun dalam kasus ini Indonesia bukanlah Negara Islam, namun pada kenyataannya PT Freeport memang berusaha menggeser peran Indonesia sebagai sebuah Negara menjadi aktor sekunder. Dalam kaitan ini Islam juga membahas apa-apa saja yang harus dimiliki oleh individu, umum, dan negara tidak sama dengan kaum Liberal yang mengutamakan kebebasan dan memaksimalkan peran individu sebagai aktor utama.

3. Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Pandangan Islam

Sumber daya alam menurut bahasa adalah potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk proses produksi. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang masalah, Freeport merupakan perusahaan industri yang menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak yang semuanya merupakan sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah Mimika, Papua.

Jika, dalam pandangan Islam, hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara yang hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Pendapat bahwa sumberdaya alam milik umum harus dikelola oleh

negara yang hasilnya diberikan kepada rakyat dikemukakan oleh An-Nabhani berdasarkan pada hadis riwayat Imam at-Turmidzi dari Abyadh bin Hamal. Dalam hadis tersebut, disebutkan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasul untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Hal ini sama dengan dalam kajian ini politik ekonomi Islam telah juga menyebutkan bahwa industri tambang besi, batu-bara, minyak dan sebagainya merupakan industri milik negara, yang artinya individu tidak dapat memilikinya namun boleh merasakan manfaat dari kekayaan alam tersebut. Dan pengelolaan industri tersebut harus dilakukan oleh Negara karena kesejahteraan masyarakat termasuk dalam kewajiban Negara (Al Maliki, 2009).

Seperti yang telah dijelaskan pada konsep politik ekonomi Islam. Maka, konsep sumber daya alam ini sangat terkait dengan pilar utama yang membahas tentang kepemilikan. Kepemilikan dibagi menjadi tiga bagian dimana disebutkan bahwa tambang yang tidak terbatas, harta benda yang merupakan kebutuhan umum (fasilitas umum), dan sumber daya alam yang pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu seperti halnya laut, sungai dan lain-lain, adalah termasuk dalam kategori kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini merupakan izin *Asy-Syari'* kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda.

Ini lah yang juga menjadi dasar bagi kelompok Hizbut Tahrir Indonesia dalam kritik-kritiknya terhadap PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia yang berlatar belakang Liberal menjadi menjadi sebuah ketakutan bagi kelompok tersebut terkait dengan ketergantungan Indonesia atas Negara barat yang sekuler yakni memisahkan segala urusan agama dengan sistem kehidupan manusia.

D. Hipotesa

Berdasar kerangka dasar teori diatas maka penulis memiliki hipotesa dalam skripsi ini yakni Hizbut Tahrir Indonesia mendesak pemerintah untuk menolak perpanjangan

Kontrak-Karya Indonesia-PT Freeport karena adanya perbedaan persepsi antara Hizbut Tahrir Indonesia yang berideologi Islam dengan pemerintah Indonesia yang berideologi Liberal, dalam hal:

1. Peran negara dalam ekonomi. Hizbut Tahrir Indonesia menggunakan pendekatan politik ekonomi dimana Negara merupakan aktor primer dalam menjamin kesejahteraan individu. Sedangkan PT Freeport Indonesia menggunakan pendekatan ekonomi politik. Ekonomi politik Liberal melihat bahwa individu ataupun swasta merupakan aktor primer yang dapat mengatur politik.
2. Pengelolaan sumber daya alam dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia termasuk dalam kepemilikan umum yang harus dikelola oleh Negara untuk kesejahteraan rakyat, bukan individu ataupun pihak swasta.

E. Tujuan Penelitian

Dari penulisan skripsi yang berjudul “Penolakan Hizbut Tahrir Terhadap PT. Freeport Indonesia” maka penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai, diantaranya:

1. Untuk mengetahui sebab-sebab Hizbut Tahrir Indonesia mendesak pemerintah untuk tidak melakukan perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hizbut Tahrir Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi jangkauan penelitian dengan studi kasus penolakan Hizbut

Tahrir Indonesia terhadap PT Freeport yang terdapat di wilayah Papua. Serta perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dan PT Freeport dalam Kontrak Karya. Pembatasan penelitian ini digunakan untuk memberikan kespesifikan masalah dan menghindari kompleksitas observasi.

G. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita. Menurut John Creswell, metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Dimana dalam penulisan skripsi ini yang menjadi gejala sentral adalah adanya berbagai jenis penolakan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang biasa disebut dengan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) terhadap Kontrak Karya Indonesia-PT Freeport.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik kepustakaan (*library reseach*). Yakni dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, artikel, jurnal ilmiah, berita dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan penelitian yakni tentang kritik dan bentuk penolakan Hizbut Tahrir Indonesia terhadap pengelolaan sumber daya alam, perusahaan Multinasional dan tentang kebijakan yang dilakukan oleh PT Freeport dengan pihak Indonesia. Dalam hal ini, maka penelitian diperoleh melalui tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk membangun obyektifikasi dalam suatu penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini, yakni:

Bab I : Penulis menjelaskan Latar Belakang Masalah berisi tentang gambaran masalah yang dijadikan penelitian;

Rumusan Masalah berisi permasalahan yang akan dibahas; Kerangka Dasar Teori sebagai analisa perumusan masalah; Jangkauan Penelitian memuat batasan perspektif Negara dan daerah yang memiliki permasalahan; Metode Penelitian memuat cara penulis dalam menganalisis permasalahan; Sistematika Penulisan berisi tentang garis besar isi penulisan.

Bab II : Bagian ini akan memberikan gambaran tentang profil Hizbut Tahrir Indonesia.

Bab III: Bagian ini akan memberikan gambaran tentang Kontrak Karya yang dilakukan oleh Indonesia-PT Freeport, dan juga berisi penguatan tentang bentuk-bentuk ataupun fakta-fakta penolakan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia terhadap PT Freeport.

Bab IV : Bagian ini akan memberikan penguatan jawaban dari rumusan masalah secara lebih spesifik yakni tentang analisis dari kerangka dasar teori yang digunakan oleh penulis dan sebab-sebab Hizbut Tahrir melakukan desakan kepada pemerintah untuk menolak perpanjangan kontrak-karya Indonesia-PT Freeport.

Bab V : Kesimpulan.